

ABSTRAK

Kondisi ditemukannya ketidak sesuaian pelaksanaan Perda dengan kondisi masyarakat ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi pelaksanaan Perda untuk mengawal pelaksanaan Perda agar tidak bermasalah. Berkaitan dengan upaya dan hingga keberhasilan perencanaan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang dalam Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum serta hambatan dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis³ normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang meliputi pendataan wajib retribusi, menentukan mekanisme pemungutan retribusi ke wajib retribusi, melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan retribusi sampah, menyetorkan pendapatan retribusi sampah ke kas daerah serta memberikan pelayanan kepada wajib retribusi terkait kebijakan. Harapan penulis Peraturan Daerah tersebut diperlukan pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, serta perlu adanya penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) karena dalam pelaksanaannya kebijakan retribusi sampah sebenarnya kurang mencukupi dan harus ditambah. Perlu diadakan pendataan langsung dilapangan, terutama pendataan jukir tidak resmi. Para jukir yang terdata ini nantinya diberikan penyuluhan dengan harapan menambah wawasan jukir berkaitan dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Retribusi Umum, Persampahan, Parkir

ABSTRACT

The condition of the finding of a discrepancy between the implementation of the Local Regulation and the condition of the community shows that there needs to be an evaluation of the implementation of the Local Regulation to oversee the implementation of the Regional Regulation so that there is no problem. Relating to efforts and to the success of PAD planning. This study aims to determine the implementation of Semarang City Regulation Number 2 of 2016 concerning Public Service Levies in the City of Semarang in Solid Waste / Cleanliness Services and Parking Services on the Side of Public Roads as well as obstacles and solutions

This research uses a normative juridical approach, which is an approach to analyze the law as a set of normative laws and regulations. The specification of this research is analytical descriptive, which is describing the applicable laws and regulations which are related to legal theories and the practice of implementing the law concerning these problems.

Implementation of Semarang City Regulation Number 2 Year 2016 Regarding General Service Levies In Semarang City includes compilation of compulsory levies, determining the mechanism of levies to compulsory levies, carrying out socialization on waste retribution policies, depositing fees on waste levies to the local treasury and providing services to compulsory levies related Policy. The writer hopes that the Regional Regulation requires intensive supervision of the implementation of the Semarang City Regional Regulation (Perda) Number 2 of 2016 on Public Service Levies, and the need for additional HR (Human Resources) because in its implementation the waste retribution policy is actually insufficient and must be added. Direct data collection is needed in the field, especially unofficial jukir data collection. The sculptures that were recorded will later be given counseling in the hope of adding insight into the sculptures related to applicable regulations.

Keywords: Local Regulations, General Retribution, Solid Waste, Parking